

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA PERIMBANGAN,  
DANA KEISTIMEWAAN DAN BELANJA MODAL TERHADAP  
KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
(Studi Kasus pada Pemerintahan Daerah Kabupaten dan Kota di  
Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2013-2018)

**Nanda Dipa Prastiwi**

*ALumnus Prodi Akuntansi FE Universitas Sarjawiyata Tamansiswa,  
Yogyakarta, Email : nandadipa15@gmail.com*

**Andri Waskita Aji**

*Prodi Akuntansi FE Universitas Sarjawiyata Tamansiswa  
Yogyakarta, Email : andriwaskita@yahoo.com*

**Abstract**

*The purpose of this study was to determine: (1) the effect of regional own-source revenue (PAD) on the financial performance of district / city governments in the Special Region of Yogyakarta (DIY), (2) the effect of balancing funds on the financial performance of district / city governments in the Special Region provinces Yogyakarta (DIY) and (3) the effect of privileged funds on the financial performance of district / city governments in the Special Region of Yogyakarta (DIY), (4) the effect of capital expenditure on the financial performance of district / city governments in the province of Special Region of Yogyakarta (DIY). This report uses the Realization of the 2013-2018 Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD), which is published through the website of the regency / city Central Statistics Agency (BPS). Government financial performance is measured by the ratio of regional financial independence. The sample used is 30 data. To test the effect of regional own-source revenue, balance funds, privileged funds and capital expenditure on government financial performance using multiple linear regression analysis. The results of the study show that: (1) regional own-source revenue (PAD) has a positive effect on financial performance, (2) balancing funds has a negative effect and (3) the special fund does not have a negative effect on the financial performance of the district / city government in the Yogyakarta Special Region (DIY), (4) capital expenditure does not have a positive effect on the financial performance of the district / city government in the province of the Special Region of Yogyakarta (DIY) .*

**Keywords:** *Regional Original Revenue, Balance Funds, Privileged Funds, Capital Expenditures and Regional Government Financial Performance*

**PENDAHULUAN**

Penerapan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal yang tertuang dalam UU nomor 22 dan 25 tahun 199 telah dilaksanakan mulai 1 januari 2001. Pelaksanaan otonomi daerah merupakan

babak baru dalam pembangunan dan pemerataan daerah. Otonomi daerah diyakini merupakan cara terbaik untuk mendorong pembangunan daerah dalam menggantikan sistem pembangunan

terpusat yang dinilai kurang bisa mempercepat pembangunan daerah dan mengurangi kesenjangan pembangunan masing-masing daerah. Rosemarry *et al.* (2016) mengungkapkan bahwa alasan diterapkannya kebijakan otonomi pada daerah secara keseluruhan oleh sebab itu pemerintah pusat melimpahkan kewenangan terhadap pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus secara mandiri kepentingan-kepentingan daerahnya.

Kinerja keuangan pemerintah dapat diukur dari seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam menggali potensi-potensi yang dimiliki daerahnya sehingga mampu memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan pendapatan asli daerah setiap tahunnya. Kinerja keuangan pemerintah daerah pada penelitian ini diukur dengan menggunakan rasio kemandirian keuangan daerah. Menurut Puspitaayu (2018) rasio kemandirian keuangan daerah menggambarkan tingkat kemampuan daerah untuk mengelola sendiri kegiatan pemerintahan daerahnya guna meningkatkan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat sebagai timbal balik atas pembayaran pajak dan retribusi yang dibayarkan oleh masyarakat kepada pemerintah daerah. Rasio kemandirian keuangan daerah dapat diukur melalui perbandingan pendapatan asli daerah dengan bantuan pemerintah pusat, diantaranya Dana Alokasi Umum (DAU) maupun Alokasi Khusus (DAK). Semakin tinggi rasio kemandirian berarti daerah dianggap semakin mampu untuk membiayai pembangunannya sendiri, demikian pula sebaliknya.

Pemerintah daerah juga perlu memperhatikan kemampuan masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi. Masyarakat harus selalu mendukung kebijakan yang dibuat oleh pemerintah daerah. Oleh karena itu sumber daya yang

dimiliki Pemerintah Daerah harus benar-benar dikembangkan secara optimal agar pembangunan dapat terlaksana dengan dana yang sesuai dengan anggaran dengan tingkat kemandirian yang tinggi. Tujuan dari penelitian adalah untuk: (1) Mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2013-2018; (2) Mengetahui pengaruh Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2013-2018; (3) Mengetahui pengaruh Dana Keistimewaan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2013-2018; (4) Mengetahui pengaruh Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2013-2018; dan (5) Mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Dana Keistimewaan, dan Belanja Modal secara bersama-sama terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2013-2018.

## **KAJIAN PUSTAKA**

### **Kinerja Keuangan Pemerintah**

Sthepen P. Robbins dan Rofiah (2016:10) mendefinisikan “kinerja merupakan hasil evaluasi terhadap pekerjaan yang telah dilakukan dibandingkan dengan kriteria yang telah ditetapkan bersama”. Sedangkan, pengukuran kinerja (*performance measurement*) adalah suatu proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Jadi, pengukuran kinerja keuangan adalah suatu proses penilaian mengenai tingkat

kemajuan pencapaian pelaksanaan pekerjaan/kegiatan dalam bidang keuangan untuk kurun waktu tertentu.

### **Pendapatan Asli Daerah**

Pendapatan asli daerah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Dengan ditambahnya infrastruktur dan perbaikan infrastruktur yang ada oleh pemerintah daerah, diharapkan akan memacu pertumbuhan perokonomian di di daerah. Sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah. (Menurut *Permendagri Nomor 13 Tahun 2006*, n.d.). Menurut Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003, Pendapatan asli daerah adalah penambah nilai kekayaan berish yang berhak diakui pemerintah daerah.

### **Dana Perimbangan**

Dana perimbangan merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemberi otonomi kepada daerah, yaitu terutama peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat semakin baik (Ferdiansyah, Deviyanti, & Pattisahusiwa, 2018). Menurut Undang-undang No. 33 tahun 2004 tentang dana perimbangan keuangan antara pemerintah pust dan pemerintah disebutkan bahwa dana perimbangan terdiri Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil.

### **Dana Keistimewaan**

Dana keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta adalah dana yang berasal dari bagian anggaran bendahara umum negara yang dialokasikan untuk mendanai kewenangan istimewa dan merupakan belanja transfer pada bagian transfer lainnya. Proses penurunan pencairan dana

keistimewaan harus melalui berbagai tahapan serta diperlukan pembuatan program-program yang berkaitan dengan keistimewaan Yogyakarta. (Peraturan Gubernur (PERGUB) Entitas Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 33, 2016).

Dana keistimewaan digunakan untuk mendanai kegiatan dalam 1 (satu) tahun anggaran dan tidak dapat digunakan untuk mendanai kegiatan yang telah didanai dari sumber lain yang bersumber dari APBN maupun APBD. Kegiatan yang didanai dengan dana keistimewaan harus dituangkan dalam program RPJMD dan RKPD.

### **Belanja Modal**

Menurut Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), belanja modal adalah penambahan asset tetap dengan cara melakukan perbelanjaan/pengeluaran yang nantinya diharapkan dapat menimbulkan manfaat lebih dalam satu periode akuntansi termasuk biaya pemeliharaan yang dimiliki fungsi menambah masa manfaat, meningkatkan kapasitas dan kualitas asset. Sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 53 menyatakan bahwa Belanja Modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan asset tetap berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan asset lainnya. Nilai pembelian/pengadaan atau pembangunan asset tetap berwujud yang dianggarkan dalam Belanja Modal hanya sebesar harga beli/bangun asset.

Aset tetap yang dimiliki sebagai akibat adanya Belanja Modal merupakan prasyarat utama pemerintah daerah dalam

memberikan pelayanan publik. Pemerintah Daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran Belanja Modal dalam APBD untuk menambah asset tetap. Anggaran Belanja Modal ini didasarkan pada kebutuhan daerah sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah maupun untuk fasilitas publik. Setiap tahun biasanya dilaksanakan pengadaan asset tetap oleh pemerintah daerah sesuai dengan prioritas anggaran dan pelayanan publik yang memberikan dampak jangka panjang secara finansial.

**Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Daerah Istimewa Yogyakarta.**

Kemampuan daerah dalam menggali dan memanfaatkan potensi daerah untuk menghasilkan pendapatan asli daerah tentunya dapat meningkatkan pendapatan daerah. Pendapatan asli daerah yang dihasilkan daerah memiliki kontribusi terhadap pertumbuhan pendapatan sehingga pemerintah daerah mampu meminimalkan ketergantungannya terhadap bantuan pendanaan yang bersumber dari pusat. Pernyataan tersebut sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan Nugroho dan Rohman (2012) yang mengungkapkan bahwa tingginya penerimaan pendapatan asli daerah dapat meningkatkan kemandirian pemerintah daerah sehingga hal tersebut berimplikasi pada kinerja keuangan pemerintah daerah. Darwanis dan Saputra (2014) mengemukakan bahwa pemerintah dapat meningkatkan pendapatan asli daerah melalui pungutan yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah sehingga pemerintah daerah meningkatkan pertumbuhan kinerja keuangannya. Julitawati dkk, (2012), dan Weny (2012) juga menemukan bahwa pendapatan asli daerah

berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Di samping itu semakin besar kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), maka akan semakin kecil pula ketergantungan terhadap bantuan pemerintah pusat (Ebit Juliawati dkk.,2012). Penelitian yang dilakukan Krisna Dwipayana Hamara (2010) dan Indah Puspa Sari (2016) menyatakan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan positif pada kinerja keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis 1 dapat dinyatakan sebagai berikut;

*H1: Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.*

**Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/ Kota Daerah Istimewa Yogyakarta**

Selain Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan khususnya DAU juga mempunyai peran utama dalam pelaksanaan otonomi daerah dalam rangka mencapai tujuan utama penyelenggaraan otonomi daerah yang ingin meningkatkan pelayanan publik dalam memajukan perekonomian daerah (Mardiasmo, 2010). Penelitian Rukmana (2013) hasil Pajak Daerah berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan, sedangkan Dana Perimbangan dan Retribusi Daerah berpengaruh negatif terhadap Kinerja Keuangan. Membuktikan semakin kecil dana perimbangan yang diberikan maka akan menunjukkan kinerja keuangan semakin baik, sebaliknya semakin besar transfer Dana Perimbangan yang diterima dari pemerintah pusat kuat akan memperlihatkan semakin kuat pemerintah daerah bergantung kepada

pemerintah pusat untuk memenuhi kebutuhan daerahnya. Sehingga akan membuat kinerja keuangan pemerintah semakin turun. Penggunaan Dana Perimbangan diharapkan dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang diharapkan dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Semakin besar penerimaan dana yang diperoleh maka akan mempengaruhi kinerja keuangan. Hal ini memotivasi pemerintah untuk lebih memperhatikan dalam penerimaan dana yang diperoleh.

Menurut Nanda (2015) menyatakan dana perimbangan yang berupa DAU tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, tetapi secara simultan berpengaruh terhadap pada kinerja keuangan pemerintah daerah. Menurut Febriyansyah (2015) dana perimbangan yang terdiri dari DAU dan DAK tidak berpengaruh pada kinerja keuangan pemerintah daerah. Juliawati (2012), Rukmana (2013) menyatkan bahwa dana peimbangan berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah. Dana Perimbangan yang meliputi Dana Bagi Hasil Pajak dan Buka Pajak serta DAU dan DAK merupakan dana transfer dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dengan tujuan untuk membiayai kelebihan belanja daerah. Dana perimbangan yang diterima dari pemerintah pusat akan memperlihatkan semakin kuat pemerintah daerah bergantung kepada pemerintah pusat untuk memenuhi kebutuhan daerahnya. Sehingga akan membuat kinerja pemerintah daerah menurun (Julitawati,2012).

$H_2$  : *Dana Perimbangan (DP) berpengaruh signifikan negatif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta.*

### **Pengaruh Dana Keistimewaan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/ Kota Daerah Istimewa Yogyakarta.**

Kewenangan DIY sebagai daerah otonom mencakup kewenangan dalam urusan Pemerintah Daerah DIY sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang pemerintah daerah dan kewenangan urusan keistimewaan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012. Kewenangan dalam urusan Keistimewaan tersebut meliputi tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur, Kelembagaan Pemerintah Daerah DIY, Kebudayaan, Pertanahan, dan Tata Ruang. Pengaturan kewenangan dalam urusan keistimewaan bertujuan untuk mewujudkan pemerintah yang demokratis, mewujudkan kesejahteraan dan kenteraman masyarakat, mewujudkan tata pemerintahan dan tatanan sosial yang menjamin ke bhineka tunggal ika dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, menciptakan pemerintah yang baik, dan melembagakan peran dan tanggung jawab Kasultanan dan Kadipaten dalam menjaga dan mengembangkan budaya Yogyakarta yang merupakan warisan budaya.

Dalam rangka mendukung efektifitas penyelenggaraan keistimewaan DIY telah diatur mengenai pendanaan keistimewaan yang pengalokasiannya dan penyalurannya melalui mekanisme transfer ke daerah. Pemerintah menyediakan pendanaan dalam rangka penyelenggaraan urusan Keistimewaan DIY dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sesuai dengan kebutuhan DIY dan Kemampuan keuangan negara.

Menurut Kariem dan Purwaningsih (2018) Danais yang meningkat setiap tahun tidak berdampak signifikan dengan realitas

angka kesenjaangan sosial dan persentase kemiskinan yang di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Semakin besar dana keistimewaan yang diberikan pemerintah pusat semakin tinggi tingkat ketergantungan pemerintah daerah ke pusat.

*H<sub>3</sub> : Dana Keistimewaan berpengaruh signifikan negatif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.*

### **Pengaruh Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Daerah Istimewa Yogyakarta**

Yulia dan Mimba (2016) mengemukakan bahwa pengalokasian dana pada belanja modal yang lebih banyak nantinya dapat membantu daerah untuk memperoleh sumber keuangan sehingga menghasilkan pendapatan daerah, sehingga berimplikasi pada peningkatan kinerja keuangan pemerintah daerah. Kegiatan belanja modal yang mampu menghasilkan sumber-sumber keuangan berasal dari pembangunan infrastruktur berupa fasilitas pelayanan umum yang dilakukan pemerintah daerah. Pembangunan infrastruktur berupa fasilitas pelayanan umum yang tinggi dapat dikatakan mampu meningkatkan pertumbuhan kinerja keuangan pemerintah daerah (Puspitasari dkk,2015). Menurut Andirfa dkk. (2016), infrastruktur yang terdapt di suatu daerah diharapkan nantinya akan mampu menciptakan efesiensi pada sektor, produktivitas masyarakat meningkat sehingga hal tersebut akan berimplikasi pada kinerja keuangan pemerintah daerah yang lebih baik. Mulyani dan Wibowo (2017) juga menemukan bahwa belanja modal berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Amrozi (2016) Nyoman (2016) mengungkapkan belanja modal berpengaruh positif signifikan terhadap variabel dependen

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Kinerja Keuangan ini berarti Belanja Modal yang besar merupakan cerminan dari banyaknya infrastruktur dan sarana yang dibangun yang nantinya dapat mendukung kegiatan pembanguna daerah baik dalam pemerintahan maupun masyarakat. Semakin banyak pembangunan yang dilakukan akan meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan landasan teori dari hasil penelitian sebelumnya, maka hipotesis keempat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut;

*H<sub>4</sub> : Belanja Modal berpengaruh positif signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta.*

### **Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Dana Keistimewaan, dan Belanja Modal secara bersama-sama terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Daerah Istimewa Yogyakarta**

Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Dana Keistimewaan dan Belanja Modal memiliki peranan yang besar sebagai sumber pembiayaan yang mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah. Penurunan PAD akan menghambat pelaksanaan kegiatan pemerintah. Begitu juga sebaliknya, peningkatan kegiatan ekonomi diberbagai daerah akan meningkatkan PAD sehingga pelaksanaan kegiatan pemerintah tidak terhambat (Hamara, 2010). Sedangkan Julitawati (2012) menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah dan Dana perimbangan berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Aceh. Sedangkan Dana Keistimewaan dan Belanja Modal tidal berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja keuangan daerah. Hal ini memberikan indikasi kuat bahwa penelitian Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Dana Keistimewaan

dan Belanja Modal akan sangat berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

$H_5$  : *Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Dana Keistimewaan dan Belanja Modal berpengaruh positif signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi DIY.*

## METODA PENELITIAN

### Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di situs Dirjen Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah dengan mengambil data laporan realisasi APBD selama periode 2013-2018. Data penelitian diunduh dari situs resmi Dirjen Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah ([www.djpk.depkeu.go.id](http://www.djpk.depkeu.go.id).)

### Metode Penentuan Subyek

Populasi merupakan kumpulan dari semua kemungkinan orang-orang, benda-benda, dan ukuran lain yang menjadi objek perhatian atau kumpulan seluruh objek yang menjadi perhatian (Purwanto:2014). Populasi dalam penelitian adalah data Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Dana Keistimewaan, Belanja Modal, Kinerja Keuangan Daerah pada Pemerintah Kabupaten dan Kota Daerah Istimewa Yogyakarta yang meliputi 4 daerah kabupaten dan 1 kota sehingga total populasi adalah 5 data.

Sampel adalah bagian dari populasi yang mempunyai karakteristik dianggap dapat mewakili keseluruhan populasi. Pada penelitian ini sampel diambil dengan metode sampling jenuh. Menurut Sugiyono (2014:85) Sampling Jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sampel. Penelitian ini mengambil data pada tahun 2013-2018, dengan jumlah sampel sebanyak 5 daerah.

Maka Jumlah sampel penelitian keseluruhan menjadi  $6 \times 5 = 30$  data.

## Teknik Analisis Data

### Uji Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai variabel-variabel dalam penelitian. Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data dilihat dari nilai rata-rata, standar deviasi, varians, maksimum, minimum, *sum*, *range*, *kurtosis*, dan *skewness* (Ghozali, 2011:9).

### Uji Asumsi Klasik

#### Uji Normalitas

Uji Normalitas adalah uji untuk mengetahui apakah data yang akan diolah telah memenuhi kriteria asumsi normalitas atau tidak dan juga untuk mengetahui apakah terdapat variabel pengganggu atau residual yang datanya berdistribusi normal. Pengujian dapat diketahui dengan cara melihat grafik histogram dan *normal probability plots* untuk menghindari hasil yang menyesatkan maka menggunakan grafik yang dilengkapi dengan uji statistik deskriptif, uji non parametric. *Kolmogorov Smirnov* (K-S), pada uji K-S apabila  $p$ . Value  $> 5\%$  maka data berdistribusi normal.

#### Uji Heterokedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari *residual* satu pengamatan ke pengamatan lain yang lain. Jika *variance* dari *residual* satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homokedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah model regresi yang homokedastisitas atau tidak terjadi heterokedastisitas (Ghozali, 2011:139). Dasar analisis yang digunakan untuk menentukan

heterokedastisitas adalah jika ada pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit, maka tekah terjadi heterokedastistas, Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heterokedastisitas

### **Uji Multikolinieritas**

Uji Multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen (Ghozali, 2013:105). Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinieritas di dalam model regresi dapat dilihat dari besarnya nilai *Tolerance* dan *VIF*-nya (*Variance Inflation Factor*). Regresi bebas dari masalah Multikolinieritas jika nilai *Tolerance* lebih dari 10 persen (0,10) dan nilai *VIF* kurang dari 10.00 maka data tidak terkena multikolinieritas diantara variabel independennya (Ghozali, 2011:106).

### **Uji Autokorelasi**

Uji Autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1. Autokorelasi dalam regresi linier dapat mengganggu suatu model, dimana akan menyebabkan terjadinya kebiasaan pada kesimpulan yang diambil. Ada beberapa cara yang digunakan untuk mendeteksi ada tidaknya autokorelasi, diantaranya melalui uji *Durbin Watson (DW-Test)*. Uji *Durbin Watson (DW test)* akan didapatkan nilai *DW* hitung (d) dan nilai *DW* table (dL atau dU). Tingkat signifikansi yang dapat digunakan dalam penelitian ini sebesar 5%. Ghozali (2011:111) menyatakan bahwa untuk mengetahui ada tidaknya masalah autokorelasi dengan uji *Durbin Watson (DW-Test)*.

### **Uji Hipotesis**

#### **Uji Regresi Linier Berganda**

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Analisis digunakan untuk menguji pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Dana Keistimewaan, Belanja Modal secara bersama-sama terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Persamaan Regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$$

#### **Uji F (Uji Signifikansi secara simultan)**

Widarjono (2010: 19) menjelaskan bahwa untuk uji signifikan pengaruh semua variabel independen secara serentak terhadap variabel dependen dilakukan dengan Uji F. Dalam hal ini berarti untuk menguji signifikansi variabel independen (Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Dana Keistimewaan, dan Belanja Modal) secara bersama-sama terhadap variabel dependen (Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah) dilakukan dengan uji F.

Supriyadi (2014:58) menjelaskan bahwa untuk menguji signifikansi seluruh variabel independen terhadap variabel dependen dilakukan dengan melihat nilai signifikan dengan uji F pada tabel ANOVA dan membandingkan dengan nilai alpha ( $\alpha$ ) yang ditentukan (umumnya nilai  $\alpha$  yang digunakan 0,01; 0,05; 0,10). Persamaan yang digunakan dalam pengujian signifikansi dalam analisis regresi. Dengan pengujian:

- Apabila angka probabilitas signifikansi > 0,05 maka  $H_a$  ditolak.
- Apabila angka probabilitas signifikansi < 0,05 maka  $H_a$  diterima.



### Uji t (Uji Signifikansi secara Parsial)

Menurut Widarjono (2010:19) uji signifikansi (significant test) pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara individu dilakukan melalui uji t. Dalam hal ini berarti untuk menguji signifikansi pengaruh variabel independen (Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Modal) secara parsial atau individual terhadap variabel dependen (Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah) dilakukan dengan menggunakan uji t (t-test). Uji t dilakukan dengan membandingkan nilai signifikansi pada tabel uji t dengan nilai alpha ( $\alpha$ ) yang telah ditentukan  $\alpha$  merupakan probabilitas menolak hipotesis yang benar. Semakin kecil  $\alpha$  berarti semakin kecil probabilitas menolak hipotesis yang benar dan semakin besar  $\alpha$  berarti semakin besar menolak hipotesis yang benar. Dalam praktiknya,  $\alpha$  biasanya ditentukan secara arbiter, yaitu 1 %, 5%, dan maksimal 10 % (Widarjono, 2010:28).

- a) Apabila angka probabilitas signifikansi > 0,05 maka  $H_0$  ditolak.
- b) Apabila angka probabilitas signifikansi < 0,05 maka  $H_0$  diterima.

### Uji Koefisien Determinasi (Adjusted R<sup>2</sup>)

Digunakan untuk mengukur seberapa jauh model dalam menerangkan variasi variabel dependen, besarnya nilai koefisien determinasi adalah  $0 < R^2 < 1$ , nilai  $R^2$  yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen terbatas. Bila nilai mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2011:97).

### Hasil Analisis Data

#### Uji Statistik Deskriptif

Dilihat bahwa deskriptif nilai minimum Pendapatan Asli Daerah sebesar

83.427.447.822, Dana Perimbangan sebesar 652.748.1133.159, Dana Keistimewaan sebesar 0, Belanja Modal sebesar 123.313.526.117, dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah sebesar 7,59. Deskriptif nilai maksimum Pendapatan Asli Daerah sebesar 894.272.961.558, Dana Perimbangan sebesar 1.368.717.993.794, Dana Keistimewaan sebesar 354.195.046.000, Belanja Modal sebesar 426.782.827.409 dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah sebesar 78,22. Deskriptif nilai rata-rata Pendapatan Asli Daerah adalah 395.850.861.532, Dana Perimbangan sebesar 1.014.545.339.242, Dana Keistimewaan sebesar 151.688.037.913, Belanja Modal sebesar 271.487.430.653 dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah sebesar 39,7137. Deskriptif nilai standar deviasi Pendapatan Asli Daerah sebesar 222.147.390.978,448, Dana Perimbangan sebesar 230.946.482.658,488, Dana Keistimewaan sebesar 94.089.026.684,352, Belanja Modal sebesar 84.204.984.167,992 dan Kinerja Keuangan Pemerintah sebesar 21,85325.

#### Uji Asumsi Klasik

##### Uji Normalitas

Dari hasil test of normality diketahui nilai statistik 0,062 atau nilai sig 0,200 atau 20% lebih besar dari nilai  $\alpha$  5%, sehingga dapat disimpulkan bahwa residual menyebar normal.

##### Uji Heterokedastisitas

Berdasarkan output SPSS dapat dilihat bahwa titik menyebar secara acak, tidak membentuk sebuah pola tertentu dan titik-titik tersebar dibawah dan di atas angka nol pada sumbu Y. Hal ini berarti tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi.

##### Uji Autokorelasi

Berdasarkan hasil pengujian autokorelasi pada menunjukkan bahwa nilai

*Durbin-Watson* sebesar sebesar 0,998 dibandingkan dengan derajat 5%, jumlah data observasi dari sampel yaitu 30, serta jumlah variabel independen sebanyak 4 variabel ( $k=4$ ) diperoleh nilai tabel *Durbin-Watson* ( $DW$ )  $dL$  sebesar 1,1426,  $dU$  sebesar 1,7386. Tidak terjadi autokorelasi jika  $dU < d < 4-dU$ , maka dalam penelitian ini dapat dibuktikan bahwa nilai *Durbin-Watson* terletak diantara  $dU$  dan  $4-dU$ . Data  $dU$  sebesar 1,7386 sehingga  $4-dU$  adalah sebesar 2,2614 maka hasilnya  $1,1426 < 0,998 < 2,2614$ . Berdasarkan pengujian tersebut dapat disimpulkan bahwa model regresi pada penelitian ini tidak terjadi autokorelasi positif dan negatif.

### Uji Multikolinearitas

Berdasarkan hasil pengujian multikolinearitas diatas, dapat diketahui bahwa nilai *Variance Inflation Factor* (*VIF*) untuk keempat variabel dibawah 10,00. Selain itu, nilai *Tolerance* keempat variabel independen menunjukkan angka lebih besar dari 0,10. Berdasarkan pengujian tersebut dapat disimpulkan bahwa model regresi yang terbentuk tidak terdapat gejala multikolinearitas antar variabel independen.

### Uji Hipotesis

#### Analisis Regresi Linier Berganda

Diperoleh persamaan regresi pada penelitian ini sebagai berikut:

$$Y=47,007+0,00000000009X_1-0,00000000004X_2-0,00000000006X_3+0,00000000001X_4+e$$

Nilai konstanta dengan koefisien regresi pada tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Nilai konstanta ( $\alpha$ ) dari hasil uji regresi linier sebesar 47,007 yang berarti jika variabel pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dana keistimewaan, dan belanja modal bernilai 0 (nol) maka kinerja keuangan pemerintah daerah ( $y$ ) nilai sebesar 47,007.

- 2) Variabel Pendapatan Asli Daerah ( $X_1$ ) sebesar 0,00000000009 berarti bahwa setiap kenaikan pendapatan asli daerah sebesar 1% akan meningkatkan kinerja keuangan sebesar 0,00000000009 dengan asumsi variabel lainnya tetap.
- 3) Variabel Dana Perimbangan ( $X_2$ ) sebesar -0,00000000004 berarti bahwa setiap kenaikan dana perimbangan sebesar 1% akan menurunkan kinerja keuangan sebesar 0,00000000004 dengan asumsi variabel lainnya tetap.
- 4) Variabel Dana Keistimewaan ( $X_3$ ) sebesar -0,00000000006 berarti setiap kenaikan dana keistimewaan 1% akan menurunkan kinerja keuangan sebesar 0,00000000006 dengan asumsi variabel lainnya tetap.
- 5) Variabel belanja modal ( $X_4$ ) sebesar 0,00000000001 berarti bahwa setiap kenaikan belanja modal sebesar 1% akan meningkatkan kinerja keuangan sebesar 0,00000000001 dengan asumsi variabel lainnya tetap.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dapat disimpulkan sebagai berikut:

#### a) Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan positif terhadap variabel Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah yang dilihat dari tingkat signifikansi 0,000 lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05 dan nilai koefisien positif sebesar 0,00000000009. Hal ini berarti bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, dan dapat disimpulkan bahwa hipotesis 1 ( $H_1$ ) diterima karena didukung data. Semakin tingginya Pendapatan Asli Daerah berarti semakin

tinggi pula Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah yang dicapai dan tingkat Kemandirian sangat tinggi.

**b) Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.**

Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa variabel Dana Perimbangan berpengaruh signifikan negatif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah yang dilihat dari tingkat signifikansi 0,000 lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05 dan nilai koefisien negatif sebesar -0,000000000004. Hal ini berarti bahwa Dana Perimbangan berpengaruh secara signifikan negatif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, dan dapat disimpulkan bahwa hipotesis 2 (H2) diterima karena didukung data. Dalam hal ini semakin tinggi dana perimbangan yang diperoleh daerah menunjukkan ketidakmandirian pemerintah daerah dalam mengelola daerahnya sendiri.

**c) Pengaruh Dana Keistimewaan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.**

Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa variabel Dana Keistimewaan tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah yang dilihat dari tingkat signifikansi 0,546 lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05 dan nilai koefisien negatif sebesar -0,000000000006. Hal ini berarti bahwa Dana Keistimewaan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, dan dapat disimpulkan bahwa hipotesis 3 (H3) ditolak karena tidak didukung data. Semakin tingginya Dana Keistimewaan yang diperoleh daerah menunjukkan ketidakmandirian pemerintah dalam menggali dan mengelola daerahnya sendiri.

**d) Pengaruh Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.**

Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa variabel Belanja Modal tidak berpengaruh signifikan positif terhadap variabel Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah yang dilihat dari tingkat signifikansi 0,579 lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05 dan nilai koefisien positif sebesar 0,000000000001. Hal ini berarti Belanja Modal tidak berpengaruh secara signifikan positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dan dapat disimpulkan bahwa hipotesis 4 (H4) ditolak karena tidak didukung data. Dalam hal ini semakin tinggi belanja modal pemerintah daerah menunjukkan kinerja keuangan yang tidak baik.

**Uji F (Uji Signifikansi secara Simultan)**

Uji F dilakukan untuk menguji pengaruh variabel dependen secara simultan atau bersama-sama. Pengujian dilakukan dengan menggunakan *significance* level 0,05 ( $\alpha=5\%$ ). Hasil uji F adalah diperoleh nilai F 117,043 dengan tingkat probabilitas 0,000. Nilai probabilitas lebih kecil dari tingkat signifikansi yaitu 5% sehingga dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah ( $X_1$ ), Dana Perimbangan ( $X_2$ ), Dana Keistimewaan ( $X_3$ ) memiliki pengaruh secara simultan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah (Y). Hal ini berarti bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Dana Keistimewaan dan Belanja Modal dapat digunakan sebagai alat ukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta.

**Uji t (Uji Signifikansi secara Parsial)**

Hasil uji t menentukan pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menjelaskan variabel dependen. Pengujian

dengan uji t ini dengan tingkat signifikansi ( $\alpha$ ) 5% pengujian terhadap masing-masing hipotesis yang diajukan ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Apabila angka probabilitas signifikansi  $> 0,05$  maka  $H_a$  ditolak.
- 2) Apabila angka probabilitas signifikansi  $< 0,05$  maka  $H_a$  diterima.

Hasil uji t adalah dapat dilihat bahwa nilai signifikansi variabel Pendapatan Asli Daerah ( $X_1$ ) sebesar 0,000 dan Dana Perimbangan ( $X_2$ ) sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Hal tersebut berarti bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan menunjukkan signifikan dengan variabel Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Sedangkan nilai signifikansi variabel Dana Keistimewaan ( $X_3$ ) sebesar 0,546 dan Belanja Modal ( $X_4$ ) sebesar 0,579 lebih besar dari 0,05 yang artinya belanja modal dan dana keistimewaan menunjukkan hubungan yang tidak signifikan dengan variabel Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah ( $Y$ ).

#### **Uji Determinisasi (Adjusted $R^2$ )**

Koefisien determinasi  $R^2$  mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu ( $0 < R < 1$ ). Semakin besar koefisien determinasinya maka semakin besar variasi variabel independennya mempengaruhi variabel dependennya. Penggunaan Adjusted  $R^2$  pada saat melakukan evaluasi model regresi dilakukan karena adjusted  $R^2$  dapat naik turun apabila satu variabel independen ditambahkan ke dalam model.

Hasil uji determinasi adalah diperoleh nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,941. Hal tersebut menunjukkan bahwa Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 94,1% dipengaruhi oleh Pendapatan Asli

Daerah, Dana Perimbangan, Dana Keistimewaan dan Belanja Modal, sedangkan sisanya 5,9% dipengaruhi oleh variabel lain diluar model penelitian.

#### **Pembahasan Hasil Penelitian**

##### **Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah**

Berdasarkan hasil uji hipotesis yang telah dilakukan menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2013-2018 memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan pendapatan Kabupaten/Kota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013-2018. Tingginya pendapatan asli daerah yang mampu dihasilkan daerah dapat meminimalkan ketergantungan daerah terhadap pendanaan yang bersumber dari pusat. Mahmudi (2009:18) berpendapat bahwa tingginya kemampuan daerah dalam menghasilkan pendapatan asli daerah, maka akan tinggi pula keputusan atau tindakan daerah dalam hal menggunakan pendapatan asli daerah tersebut yang disesuaikan dengan kebutuhan dan pembangunan daerah. Peningkatan pendapatan daerah dapat menyebabkan terjadinya peningkatan kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai sendiri segala kegiatan daerahnya sehingga memberikan indikasi bahwa pemerintah daerah telah memiliki kinerja yang baik.

Hasil penelitian ini senada dengan hasil penelitian yang dilakukan Indah Puspa Sari (2016) yang menyatakan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal ini berarti bahwa pendapatan asli daerah memberikan kontribusi dalam peningkatan kinerja keuangan pemerintah daerah.

Semakin tinggi pendapatan asli daerah yang dimiliki oleh pemerintah daerah maka akan berpengaruh pada tingginya kinerja keuangan pemerintah daerah. Pemerintah daerah yang memiliki pendapatan asli daerah yang tinggi menunjukkan bahwa daerah tersebut memiliki kemandirian dalam membiayai pengeluaran daerah. Hasil penelitian Darwis dan Saputra (2014) menyatakan bahwa pemerintah daerah dapat meningkatkan pendapatan asli daerah melalui pungutan yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah sehingga dapat memicu pertumbuhan kinerja keuangan daerah. Namun penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan Kusnadi Yudha Wiguna (2015) pendapatan asli daerah tidak signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

#### **Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah**

Dana perimbangan adalah sumber lain sebagai pembentuk pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah. Semakin besar dana perimbangan yang diperoleh oleh pemerintah pusat ke pemerintah daerah maka dapat menurunkan tingkat kemampuan keuangan dan kemandirian keuangan pada pemerintah daerah adalah rendah karena tingkat ketergantungan yang tinggi serta bersifat terikat tersebut membuat daerah tidak memiliki kewenangan dan kebebasan dalam hal penggunaan sumber pendapatan tersebut sehingga prinsip otonomi daerah akan sulit tercapai jika pemerintah daerah bergantung pada dana perimbangan. Hal tersebut dapat menunjukkan bahwa dana perimbangan yang semakin tinggi diterima oleh pemerintah daerah dari pemerintah pusat akan menunjukkan tingkat kemandirian daerah yang semakin rendah atau menurun. Hal ini menunjukkan ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat. Tingkat kemandirian daerah yang rendah akan

menunjukkan kinerja keuangan yang lemah atau kurang baik.

Hasil hipotesis kedua sejalan dengan penelitian Al Farisi (2015) dan (Indah Puspa Sari, 2016) bahwa dana perimbangan berpengaruh signifikan negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah karena semakin besar dana perimbangan yang diperoleh dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah maka dapat mencerminkan tingkat kemampuan keuangan dan kemandirian keuangan pada pemerintah daerah adalah rendah karena tingkat ketergantungan tinggi serta bersifat terikat tersebut membuat daerah tidak memiliki kewenangan dan kebebasan dalam hal penggunaan sumber pendapatan tersebut sehingga prinsip otonomi daerah akan sulit tercapai jika pemerintah daerah bergantung pada dana perimbangan.

#### **Pengaruh Dana Keistimewaan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.**

Hasil dari hipotesis ketiga adalah Dana Keistimewaan tidak berpengaruh signifikan negatif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Hal ini dapat dilihat dari nilai signifikansi dana keistimewaan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah lebih besar dari nilai taraf signifikansi 5% ( $0,546 > 0,05$ ) yang menunjukkan bahwa variabel Dana Keistimewaan tidak berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Sedangkan nilai koefisien korelasi sebesar  $-0,000000000006$  yang menunjukkan bahwa hubungan antara dana keistimewaan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah bersifat negatif dan berbanding terbalik.

Hal ini seperti yang terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta yang memiliki kewenangan istimewa dalam mengatur urusan pemerintahannya. Artinya artinya semakin tinggi dana keistimewaan semakin

tinggi pula kesenjangan sosial dan kinerja keuangan pemerintah. Seharusnya masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta mendapatkan benefit dari lahirnya Undang-Undang Keistimewaan yaitu berupa kesejahteraan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Keistimewaan Yogyakarta bukanlah urusan politik kekuasaan semata namun esensi dari aturan tersebut berupa urusan-urusan permasalahan masyarakat. Adapun tujuan keistimewaan adalah untuk mewujudkan pemerintahan yang demokratis, mewujudkan kesejahteraan dan kentrangan masyarakat, mewujudkan tata pemerintah dan tatanan sosial yang menjamin.

### **Pengaruh Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.**

Hal tersebut menunjukkan tidak adanya pengaruh belanja modal yang diasumsikan dalam pengeluaran kas pemerintah daerah untuk menambah aset tetap yang nantinya akan dimanfaatkan untuk pembangunan daerah dan mencerminkan kinerja keuangan pemerintah. Hal ini menjadi pertimbangan bahwa adanya belanja modal yang berwujud aset tetap tidak serta merta menjadi cerminan bahwa dengan belanja modal yang dapat menjadi cerminan kinerja keuangan yang baik justru malah sebaliknya, belanja modal dapat menjadi objek pemborosan oleh pemerintah daerah bahkan menjadi sumber praktik dari korupsi. Dalam konteks lain yang mana belanja modal seharusnya dapat bermanfaat untuk kemajuan dan pembangu daerah justru menjadi tidak bermanfaat ketika pemerintah daerah salah sasaran dalam melaksanakan belanja modal yang tidak sesuai dengan daerahnya, sehingga tidak terciptanya *benefit* dan *impact* kepada daerah tersebut sehingga sulit untuk mencerminkan kinerja keuangan yang baik dalam pemerintah daerah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Raka Wijayanto (2017) dan Kusnadi Yudha Wiguna (2015) dimana belanja modal tidak mempunyai signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Belanja modal merupakan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap/inventaris yang memberikan manfaat lebih satu periode akuntansi, termasuk di dalamnya yaitu pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang bersifat mempertahankan atau menambah masa manfaat serta meningkatkan kapasitas dan kualitas aset (Dinna Tri Yulihantini, 2017). Semakin besar porsi belanja modal pemerintah daerah dalam jangka panjang akan dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta dapat meningkatkan pendapatan asli daerah sehingga berdampak pada kinerja keuangan pemerintah daerah yang lebih baik. Hasil penelitian yang dilakukan Fajar Nugroho dan Abdul Rohman (2012) yang menyatakan bahwa bahwa belanja modal berpengaruh positif secara tidak langsung terhadap kinerja keuangan melalui pendapatan asli daerah.

### **Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Dana Keistimewaan dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah**

Hasil penelitian mendukung hipotesis kelima bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Dana Keistimewaan dan Belanja Modal secara bersama-sama terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal ini ditunjukkan dengan hasil perhitungan dengan analisis regresi berganda diperoleh hasil adalah sehingga persamaan regresinya adalah  $Y = 47,007 +$

$0,00000000009 - 0,00000000004 - 0,000000000006 + 0,00000000001 + e.$

Berdasarkan persamaan tersebut menunjukkan Variabel Pendapatan Asli Daerah ( $X_1$ ) sebesar 0,00000000009 berarti bahwa setiap kenaikan pendapatan asli daerah sebesar 1% akan meningkatkan kinerja keuangan sebesar 0,00000000009 dengan asumsi variabel lainnya tetap. Variabel Dana Perimbangan ( $X_2$ ) sebesar -0,00000000004 berarti bahwa setiap kenaikan dana perimbangan sebesar 1% akan menurunkan kinerja keuangan sebesar 0,00000000004 dengan asumsi variabel lainnya tetap. Variabel Dana Keistimewaan ( $X_3$ ) sebesar -0,00000000006 berarti setiap kenaikan dana keistimewaan 1% akan menurunkan kinerja keuangan sebesar 0,00000000006 dengan asumsi variabel lainnya tetap. Variabel belanja modal ( $X_4$ ) sebesar 0,00000000001 berarti bahwa setiap kenaikan belanja modal sebesar 1% akan meningkatkan kinerja keuangan sebesar 0,00000000001 dengan asumsi variabel lainnya tetap.

Hasil uji F dilihat tabel dalam kolom *sig*. Digunakan taraf signifikansi 5% (0,05), jika nilai probabilitas < 0,05. Dari tabel diatas tersebut diketahui nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari dari 0,05 (0,000 < 0,05). Yang artinya secara bersama-sama pengaruh variabel Pendapatan Asli Daerah ( $X_1$ ), Dana Perimbangan ( $X_2$ ), Dana Keistimewaan ( $X_3$ ) dan Belanja Modal ( $X_4$ ) terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Y) adalah positif dan signifikan. Nilai koefisien determinasi hal tersebut menunjukkan bahwa Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 94,1% dipengaruhi oleh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Dana Keistimewaan dan Belanja Modal, sedangkan sisanya 5,9% dipengaruhi oleh variabel lain diluar model penelitian.

## SIMPULAN DAN SARAN

### Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2013-2018.
- Dana Perimbangan berpengaruh signifikan negatif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2013-2018.
- Dana Keistimewaan berpengaruh tidak signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2013-2018.
- Belanja Modal berpengaruh tidak signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2013-2018.
- Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Dana Keistimewaan, dan Belanja Modal secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2013-2018.

### Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, maka saran-saran yang diajukan adalah:

- Bagi Instansi
  - Pemerintah daerah selau yang berwenang dalam mengelola keuangan daerah diharapkan dapat mempertahankan dan lebih

meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah melalui intensifikasi yaitu pembinaan, dan ekstensifikasi yaitu dengan penggalan potensi seperti pada sektor pariwisata dan retribusi yang belum dimanfaatkan secara optimal dan memanfaatkan pendapatan lain-lain pendapatan asli daerah, karena pendapatan asli daerah adalah penentu kemandirian daerah dan efektif dan efisiensi suatu daerah.

- Pemerintah Daerah harus menekan dana perimbangan dari pemerintah pusat agar tingkat ketergantungan terhadap pemerintah pusat menjadi rendah.
- b. Bagi Peneliti Selanjutnya
- Meninjau Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah untuk provinsi-provinsi lain mengingat ada 33 provinsi di Indonesia.
  - Meninjau variabel-variabel independen lainnya selain yang digunakan yaitu Dana Otonomi Khusus, Pajak Daerah, *Real Estate*, *Capital*, *Grant* atau faktor non keuangan lain.
  - Peneliti Selanjutnya diharapkan menggunakan rasio lain selain rasio di atas.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Andirfa, Mulia, dan Hasan Basri (2016). "Pengaruh Belanja Modal, Dana Perimbangan, dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan Kabupaten dan Kota di Provinsi Aceh". *Jurnal Magister Akuntansi*, 5(3), 30-38.

Darwanis dan Ryanda Saputra (2014). "Pengaruh Belanja Modal terhadap Pendapatan Asli Daerah dan Dampaknya pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah". *Jurnal Dinamika Akuntansi Dan Bisnis*, 1(2), 183-199.

Dinna Tri Yulihantini (2015). "Pengaruh Belanja Modal dan Alokasi Dana Desa terhadap Kemandirian dan Kinerja Keuangan Desa di Kabupaten Jember". *Tesis. Program Studi Magister Manajemen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Jember*.

Ebit Julitawati, D. dan J. (2012). "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Aceh". *Jurnal Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*, ISSN 2302-0164.

Fajar Nugroho dan Abdul Rohman (2012). "Pengaruh Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Kinerja Keuangan Daerah dengan Pendapatan Asli Daerah sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus di Propinsi Jawa Tengah)". *Diponegoro Journal of Accounting*, 1(2).

Febriansyah, A. (2015). "Pengaruh PAD, DAU, dan DAK terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota SeSumatera Bagian Selatan". *Universitas Sumatera Utara., SNA 18*.

Ghozali. I. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariante dengan program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit *UNDIP*.

Indah Puspa Sari (2016). "Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Pad, Leverage, Dana Perimbangan Dan Ukuran Legislatif Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Kab/Kota Pulau Sumatra)". *Jurnal JOM Fekon*, 3(1).

Juliawati, Ebit, Darwanis. Jalaluddin (2012). "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh". *Tesis. Universitas Syiah Kuala: Banda Aceh*.



- Hamara, Krisna Dwipayana (2010). "Pengaruh Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Tasikmalaya". *Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Siliwangi*, 1(12).
- Wiguna, Kusnadi Yudha (2015). "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Belanja Modal Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan". *Jurnal Unmura*, 4(2).
- Mahmudi (2016). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Yogyakarta: STIM YKPN*.
- Mulyani, S. dan H. W. (2017). "Pengaruh Belanja Modal, Ukuran Pemerintah Daerah, Intergovernmental Revenue dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan". *Kompartemen*, 15(1), 57-66.
- Nugroho, F. dan A. R. (2013). "Pengaruh Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Kinerja Keuangan Daerah dengan Pendapatan Asli Daerah sebagai Variabel Intervening". *Diponegoro Journal of Accounting*, 1(2), 114.
- Priyatno, D. (2013). *Olah Data Statistik dengan Program PSPP (sebagai Alternatif SPSS)*.
- Puspitasari, P. (2015). "Pengaruh Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Kinerja Keuangan Daerah dengan Pendapatan Asli Daerah sebagai variabel intervening". *Jurusan Akuntansi*, 3(1), 1-23.
- Ayu, Putri Puspita (2018). "Analisis PAD dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemda Se-Jawa Barat". *Jurnal Akuntansi & EKonomi FE. UN PGRI Kediri ISSN: 2541-0180*, 3(1), 88.
- Wijayanto, Raka (2017). "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Kabupaten/Kota di Indonesia)". *Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*
- Rosemarry., Chinyeaka Justine., B. B. (2016). "Local Government Financial Autonomy: A Comparative Analysis of Nigeria and Brazil". *Arabian Journal Of Bussiness and Management Review (OMAN Chapter)*, 5(10), 38-54.
- Republik Indonesia (2007). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Republik Indonesia (2012). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta
- Yulia, Astiti D.N., dan N. P. S. H. M. (2016). "Pengaruh Belanja Rutin dan Belanja Modal pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah". *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, s14(3), 1924-1950.